
IMPLEMENTATION OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM IN BLUD UPT PUSKESMAS PAHANDUT PALANGKA RAYA POST TRANSFER OF STATUS

Murdia Lestari

IAIN Palangkaraya

murdialestari1@gmail.com

Abstract: *Accounting information systems are so important. In services the workforce at BLUD UPT Pahandut Public Health Center still often occurs in calculation errors because there is no latest report on the rank of the workforce itself so that the incentives given are not in accordance with what the workforce should get based on their respective ranks or years of service, respectively. The aims of this study are (1) to describe the application of the cash disbursement cycle for labor services and to (2) to describe the impact of changing the status of the BLUD UPT Pahandut Public Health Center Palangka Raya from UPTD to BLUD on the expenditure cycle.*

This research is a field research, with a descriptive approach. The method used in this study is a qualitative method. The subjects in this study were the Head of the Administration the BLUD Expenditure Treasurer, financial staff other contract personnel. The data collection techniques were observation, interviews, and documentation which were then analyzed using data collection techniques, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The result of this research is that the BLUD UPT Pahandut Public Health Center has been able to implement an accounting information system quite well during the status transition. It's just that there are obstacles that often occur and can lead to calculation errors. The impact of the change in status led to adjustments from the Public Health Center and their workforce, decreased service incentive income, and the source of funds came from BLUD revenues.

Keywords: *Implementation; BLUD; Transfer Status*

PENDAHULUAN

Sistem informasi akuntansi dapat diselenggarakan secara manual (tanpa alat bantu komputer) maupun dengan memanfaatkan teknologi komputer dan teknologi informasi terbaru, atau berupa kombinasi antara keduanya. Meskipun demikian, proses yang dilakukan oleh sistem informasi akuntansi pada dasarnya sama, yaitu mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan, dan melaporkan data dan informasi.¹

Puskesmas merupakan kesatuan organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima, dan terjangkau oleh masyarakat dengan peran aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat luas guna mencapai derajat kesehatan yang optimal tanpa

mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan.²

Pada bulan Januari 2020, Pemerintah Kota Palangka Raya meresmikan alih status Puskesmas Pahandut yang sebelumnya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/404/2019 tentang penetapan pusat kesehatan masyarakat Pahandut Kota Palangka Raya yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.³ Alih status ini memberikan harapan mampu menambah layanan kesehatan menjadi lebih baik lagi bagi masyarakat luas. Penerapan Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di UPT Puskesmas Pahandut dapat mendorong untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas. Puskesmas Pahandut dapat melakukan layanan kesehatan dengan

¹ Krismiaji, *Sistem Informasi Akuntansi*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu YKPN, 2015, h. 4-5.

² Ratna Ekasari, M. Sungging Pradana, dkk, *Analisis Kualitas Pelayanan Puskesmas dengan Metode Seroqual*, Jurnal Darussalam; Jurnal

Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam, Vol. IX, No. 1: 86-93, h. 88.

³ SK Penetapan BLUD Pahandut, Keputusan Walikota Palangka Raya, Nomor 188.45/404/2019.

menggunakan anggaran belanja sendiri tanpa harus menunggu pagu anggaran lewat APBD.⁴ Dengan berubahnya status, maka pengelolaan keuangan Puskesmas Pahandut akan berubah total seperti penyusunan laporan keuangan harus berdasarkan PSAP 13 yang ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pengelolaan keuangan Puskesmas non BLU tunduk pada ketentuan pengelolaan keuangan negara, seluruh pendapatan yang diperoleh puskesmas harus disetorkan ke kas daerah. Berbeda dengan puskesmas yang berstatus BLUD, pengelolaan keuangannya lebih fleksibel. Fleksibilitas yang diberikan berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.⁵

Berdasarkan peralihan status layanan itulah, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai penerapan sistem pengeluaran kas pasca alih status dari UPTD menjadi BLUD pada BLUD UPT

Puskesmas Pahandut. Alih status ini baru saja dilakukan kurang lebih satu tahun sehingga Puskesmas Pahandut masih beradaptasi dalam penerapan standar pelaporan keuangan yang baru. Peneliti ingin menjabarkan prosedur pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD UPT Puskesmas Pahandut pasca beralih status dari UPTD menjadi BLUD, khususnya pada pengeluaran kas untuk jasa pelayanan (JasPel).

Kemudian hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, menemukan bahwa Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis (BLUD UPT) Puskesmas Pahandut dalam pelaksanaan pengeluaran kas, khususnya pada pengeluaran jasa pelayanan tenaga kerja masih kerap terjadi kesalahan penghitungan sehingga insentif yang diberikan biasanya tidak sesuai dengan yang seharusnya tenaga kerja tersebut dapatkan berdasarkan pangkat atau masa kerja masing-masing.⁶ Hal ini didukung oleh penelitian yang

⁴ *Apresiasi Penerapan BLUD di Puskesmas Pahandut*, mediacenter.palangkarya.go.id, 9 Januari 2020, diakses pada 12 April 2021.

⁵ *Mengubah Status Puskesmas Menjadi BLUD*, JAMSOS INDONESIA, dalam

jamsosindonesia.com, diakses pada 12 April 2021.

⁶ *Observasi Bagian Pengeluaran Kas di Bagian Keuangan Puskesmas Pahandut Kota Palangka Raya*, 03 Juli 2021.

dilakukan oleh Thomas Andika Permana,⁷ adanya kriteria yang tidak memenuhi penerapan karakteristik sistem informasi akuntansi penerimaan kas di Klinik Adhiwarga PKBI DIY. Dari hal tersebut, membuat peneliti sadar bahwa sistem informasi akuntansi, khususnya pada pengeluaran kas sangat penting bagi BLUD UPT Puskesmas Pahandut dalam menjalankan aktivitasnya. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis (BLUD UPT) Puskesmas Pahandut Palangka Raya Pasca Alih Status.” dan memilih Puskesmas Pahandut sebagai objek penelitian karena puskesmas tersebut adalah satu-satunya puskesmas yang saat ini berstatus BLUD di Kota Palangka Raya.

KAJIAN PUSTAKA

Siklus Pengeluaran Kas

Siklus pengeluaran merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang berhubungan dengan pembelian dan pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli. Dalam siklus ini, pihak eksternal yang terlibat adalah pemasok. Pihak internal yang terkait adalah siklus produksi, pendapatan, dan buku besar serta laporan.⁸ Pengeluaran kas berupa pembayaran bisa menggunakan uang tunai maupun cek.⁹

Menurut Mujilan menerangkan bahwa pengeluaran kas adalah kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pendistribusian barang atau jasa ke entitas-entitas lain, dan pengumpulan pembayaran-pembayaran.¹⁰ Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Benedicta Nadia Dwi Cahyawati.¹¹

⁷ Fakultas Ekonomi, Universitas Santa Dharma Yogyakarta dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas (Studi Kasus di Klinik Adhiwarga PKBI DIY)”, tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada Klinik Adhiwarga PKBI DIY.

⁸ Krismiaji, *Sistem Informasi Akuntansi*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, cet. Ke-4 2015, h. 347.

⁹ V. Wiratna Sujarweni, *Sistem Akuntansi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.

¹⁰ <https://www.harmony.co.id/blog/ap-a-itu-pengeluaran-kas-dalam-akuntansi-simak-selengkapny>, diakses 30 september 2021 pukul 09.39 WIB.

¹¹ Dengan judul Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas di Puskesmas Depok III, tahun 2020. Dengan hasil penelitian menunjukkan

Menurut Romney pengeluaran kas merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan data terkait secara berulang, yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa.¹² Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Nurazila.¹³ Hal ini dapat dilihat dari hasil prosedur-prosedur penerimaan pasien yang mulai dari pendaftaran rawat inap sampai pasien keluar sehingga dalam pengeluaran kas juga memuat rangkaian aktivitas yang sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 (PSAP 13)

PSAP 13 (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) berbasis akrual Nomor 13 tentang penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan pemerintah

pusat/pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Laporan Keuangan BLU adalah bentuk pertanggungjawaban BLU yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.¹⁴

Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Siti Nurhasanah, Ismet Ismatullah, dan Venita Sofiani dengan judul Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Obat Dalam Pencegahan Kecurangan Pada

bahwa Puskesmas Depok III belum sepenuhnya memenuhi unsur-unsur sistem informasi penerimaan kas sehingga begitu juga sebaliknya untuk pengeluaran kas.

¹² Taufan Adi Kurniawan, *Sistem Informasi Akuntansi dengan Pendekatan Simulasi*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020, h. 99.

¹³ Dengan judul Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Pada Pendapatan Jasa Rawat Inap Pada Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu Kabupaten Enrekang, tahun

2018. Dengan hasil penelitian sistem akuntansi penerimaan kas instalasi rawat inap pada Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu sudah sangat bagus.

¹⁴ *Standar Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan Nomor 13, Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum*, Jakarta: KSAP (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan), salinan, 2015, h. 3-4.

Puskesmas, tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan untuk kualitatif adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun, hasil penelitian ini merupakan tiga dari empat Puskesmas sudah menerapkan sistem informasi akuntansi pada persediaan obat sedangkan satu puskesmas menyatakan belum menerapkan sistem informasi akuntansi karena belum ada secara kedinasan.¹⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan pendekatan deskriptif. Data yang dikumpulkan dengan pendekatan deskriptif ini adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang objek dengan

mencatat apa yang ada dalam objek penelitian kemudian memasukkannya dengan sumber data yang ada dalam objek penelitian.¹⁶ Penelitian kualitatif deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.

Adapun penelitian ini yaitu penerapan sistem informasi akuntansi pada BLUD UPT Puskesmas Pahandut Palangka Raya pasca alih status. Peneliti menganalisis hasil dari penelitian penerapan siklus pengeluaran kas untuk jasa pelayanan tenaga kerja di BLUD UPT Puskesmas Pahandut Palangka Raya akan disajikan dan diinterpretasikan dalam bentuk penyajian-penyajian data dari pegawai BLUD UPT Puskesmas Pahandut Palangka Raya yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Peneliti membuat

¹⁵ Siti Nurhasanah, dkk, *Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Obat Dalam Pencegahan Kecurangan Pada Puskesmas*, Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, Vol. 2, No. 2, 2019.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, h. 12.

hasil transkrip wawancara dari setiap informan. Kemudian, peneliti melakukan reduksi data dengan mengikhtisarkan hasil pengumpulan data selengkapnya dan memilah-milahnya ke dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu atau tema tertentu sehingga apabila ada data dianggap tidak pantas atau kurang valid akan dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam pembahasan.

Percakapan-percakapan yang relevan dianotasikan dalam reduksi data digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang ada. Hasil dari menganotasi percakapan tersebut kemudian dibuat dalam bentuk kode-kode. Selanjutnya, berdasarkan kode-kode tersebut peneliti membuat deskripsi dan tema. Kemudian, dari tema-tema itu yang berasal dari informan digabungkan dan dihubungkan untuk membentuk suatu tema baru yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian ini. Hasil dari analisis tema dapat dilihat pada lampiran 1.¹⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada BLUD UPT Puskesmas Pahandut Palangka Raya Pasca Alih Status

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi selama dilakukannya penelitian maka dapat diketahui bahwa sistem pencatatan yang telah dilaksanakan oleh BLUD UPT Puskesmas selama ini cukup sederhana dan terarah. Sesuai dengan ketentuan PSAP 13 tentang BLU, satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan, antara lain pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengelolaan utang-piutang, pengelolaan investasi dan pengadaan barang/jasa, kesempatan untuk mempekerjakan tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya. Namun, juga harus tetap berdasarkan prosedur yang berlaku baik itu oleh PERWALI maupun

¹⁷ Hilmi Satria Himawan, *Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Persediaan (Studi pada*

Hamzah Batik), Tesis Magister, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2018, h. 64.

PERMENDAGRI tentang pengelolaan keuangan BLUD khususnya untuk insentif jasa pelayanan.

Di setiap berjalannya suatu kegiatan dalam hal ini administrasi, biasanya ada saja kesalahan atau *human error* yang kerap terjadi di lapangan sehingga tanggapan pihak BLUD UPT Puskesmas Pahandut apabila adanya hal demikian adalah dengan menunda pencairan dana insentif jasa pelayanan hingga berkas-berkas yang diperlukan untuk administrasinya sudah dilengkapi sesuai dengan SOP yang berlaku.

Penerapan siklus pengeluaran kas untuk jasa pelayanan tenaga kerja di BLUD UPT Puskesmas Pahandut Palangka Raya. Temuan di lapangan menyatakan bahwa sudah berjalan sebagaimana mestinya. Namun, terkadang ada kendala yang memang tidak bisa diprediksi akan kembali terjadi setiap pencairan dana insentif dilaksanakan. Hal tersebut disebabkan karena SK atau pangkat tenaga kerja di puskesmas yang perlu diperbaharui setiap adanya perubahan pangkat atau golongan, karena itu akan berpengaruh terhadap poin-poin pembagian insentif jasa pelayanan bagi individu yang

kemudian akan berpengaruh juga ke jumlah insentif yang diterima oleh tenaga kerja lainnya.

Hasil triangulasi sumber menunjukkan bahwa BLUD UPT Puskesmas Pahandut belum mampu mengatasi dan menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan yang ditemukan tersebut sehingga pihak keuangan harusnya mempertegas alur pengeluaran kas untuk insentif jasa pelayanan ini dengan lebih rinci dan mudah dipahami. Agar kejadian serupa setidaknya tidak terulang lagi, maka disarankan agar dibuatkannya skema untuk pencairan insentif jasa pelayanan. Walaupun dinilai lebih rumit, hal tersebut akan mengurangi terjadinya kesalahan perhitungan yang akibatnya akan dirasakan oleh seluruh pegawai penerima insentif. Dalam Islam melarang mengambil hak orang lain, karena tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak terpuji. Meskipun, hal ini tidak secara sengaja dilakukan, tetapi apabila ketika diketahui kesalahan tersebut terus saja terjadi secara berulang dan tidak juga ditemukan solusi yang tepat. Sementara ada banyak pihak yang akan dirugikan.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Umamah secara marfu' disebutkan:¹⁸

مَنْ افْتَتَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَمِينِهِ، فَقَدْ اَوْجَبَ
اللَّهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ « فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ
كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَضِيًّا
مِنْ أَرَاكَ

Artinya: "Barangsiapa yang mengambil harta saudaranya dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan dia masuk neraka dan mengharamkan masuk surga. Lalu ada seorang yang bertanya, "Wahai Rasulullah, meskipun hanya sedikit?" Beliau menjawab, "Meskipun hanya sebatang kayu arak (kayu untuk siwak)."

Pembentukan dana kas untuk insentif jasa pelayanan di BLUD UPT Puskesmas Pahandut harus memenuhi 5% dari jumlah keseluruhan pasien, yang memiliki pengaruh terhadap besaran persentase dana dari BPJS/JKN yang diterima oleh BLUD UPT Puskesmas Pahandut. Kemudian, untuk aturan pembagian insentif jasa pelayanan berdasarkan dana yang didapat dari BPJS/JKN adalah 70:30 menurut

PERMENDAGRI di tahun 2021 dan 60:40 menurut PERWALI di tahun 2022.

Bentuk laporan yang dihasilkan atau dibuat untuk insentif jasa pelayanan ini, pihak Puskesmas Pahandut sudah melaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan pelaporan yang harus sampai ke Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, yakni Buku Kas Umum (BKU) dan Laporan Realisasi.

Dampak Perubahan Alih Status BLUD UPT Puskesmas Pahandut Palangka Raya dari UPTD ke BLUD pada Siklus Pengeluaran Kas Untuk Jasa Pelayanan Tenaga Kerja

Triangulasi sumber berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa untuk insentif jasa pelayanan ini bersumber dari dana JKN yang kini bergabung menjadi satu di pendapatan langsung BLUD. Sebelumnya, dana JKN berada di luar dari pendapatan BLUD, sehingga melakukan pembayaran secara langsung yang kemudian dari 100% dana tersebut dibagi untuk biaya

¹⁸ PengusahaMuslim.Com, *Hukum Mengambil Dan Menguasai Hak Orang Lain Secara Zalim* (bag. 1),

<https://pengusahamuslim.com/3232-hukum-mengambil-dan-1720.html>, diakses pada 14 April 2022.

operasional dan insentif jasa pelayanan. Sementara ketika sudah bergabung di BLUD, dana insentif pelayanan bersumber dari BLUD yang di dalamnya bersumber pula dari JKN.

Alih status Puskesmas Pahandut yang mulanya UPT menjadi BLUD merupakan suatu hal yang baru bagi tenaga kerja di puskesmas. Sebab, status baru yang diperoleh memungkinkan untuk mengelola keuangan secara mandiri sehingga perlu adanya adaptasi hingga penerapannya benar-benar sempurna alias bisa dijalankan dengan baik. Di bagian ini, terkait pengaruh alih status UPTD ke BLUD terhadap pengeluaran kas, khususnya untuk jasa pelayanan di Puskesmas Pahandut. Dampak dari peralihan status ini ialah pembagian persentase insentif jasa pelayanan, awalnya 70:30 menjadi 60:40 berdasarkan PERWALI yang berlaku tentang pengelolaan keuangan dana JKN. 60% untuk insentif jasa pelayanan, dan 40% untuk operasional.

Selain itu, alih status ini membuat nominal pembagian insentif jasa pelayanan bergantung sepenuhnya terhadap pendapatan BLUD Puskesmas.

Terkait penerimaan insentif oleh tenaga kerja (ASN dan tenaga kontrak). Tentu dampak yang signifikan dirasakan oleh semua pihak, terlebih ketika terjadinya kesalahan di salah satu tenaga kerja saja akan berdampak pada seluruh tenaga kerja sehingga diperkirakan bahwa peralihan status ini setidaknya agak lebih memberatkan sebab persentase pembagiannya sudah berkurang ditambah pula dengan kendala tersebut. Walaupun puskesmas sudah mengelola keuangan secara mandiri, tetap saja akan berdampak pada besaran nominal dana insentif jasa pelayanan yang dibagikan karena bergantung dari besaran pendapatan BLUD.

Kemudian, untuk dampak yang dirasakan masing-masing pihak sebagai tenaga kerja penerima insentif jasa pelayanan, ditemukan adanya penyesuaian yang masih perlu dilakukan oleh tenaga kerja di puskesmas.

Flowchart Pengeluaran Kas Insentif Jasa Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Pahandut

Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan informan di BLUD UPT Puskesmas Pahandut akan dipaparkan mengenai alur *flowchart* pengeluaran kas untuk insentif jasa pelayanan yang ada di BLUD UPT Puskesmas Pahandut.

1. Pertama, siklus pengeluaran kas insentif jasa pelayanan ini dimulai dari masuknya transferan dana dari BPJS/JKN ke rekening BLUD UPT Puskesmas Pahandut.
2. Kedua, divisi keuangan BLUD UPT Puskesmas Pahandut mencetak rekening koran di bank yang bersangkutan. Kemudian, membuat NCR atau slip gaji yang kemudian diketahui (ditandatangani) oleh bendahara pengeluaran BLUD. Berkas NCR tersebut selanjutnya diserahkan kepada Kepala Bagian Tata Usaha (KABAG TU) yang akan melakukan pengecekan kesesuaian dokumen sebelum diserahkan kepada Pimpinan. Apabila dokumen tidak sesuai, maka akan dikembalikan ke divisi keuangan untuk diperbaiki. Namun, apabila sudah sesuai, maka

akan diserahkan pada Pimpinan untuk ditandatangani. Dokumen NCR yang sudah diberi TTD dan stempel oleh Pimpinan akan diserahkan kembali ke divisi keuangan dan diarsipkan.

3. Ketiga, divisi keuangan membuat SPJ insentif jasa pelayanan yang berisi rincian nama dan nominal yang diterima perorangan serta kolom tandatangan penerima. SPJ tersebut ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran kemudian ditembuskan kembali ke Pimpinan untuk penandatanganan dan stempel. Selanjutnya, diserahkan pada KABAG TU yang bertanggungjawab untuk menginformasikan kepada seluruh tenaga kerja untuk melakukan tandatangan penerimaan insentif jasa pelayanan. KABAG TU menyerahkan ke divisi keuangan lagi berkas SPJ yang sudah lengkap ditandatangani oleh seluruh tenaga kerja.
4. Keempat, divisi keuangan melakukan pencairan insentif jasa pelayanan melalui transfer rekening, membuat Laporan Realisasi dan

mengolah Buku Kas Umum (BKU) yang kemudian diserahkan ke pihak Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, serta mengarsipkan salinan berkas tersebut.

Saran Flowchart Pengeluaran Kas Insentif Jasa Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Pahandut

Adapun saran *flowchart* yang dapat digunakan pihak BLUD UPT Puskesmas Pahandut untuk mengatasi atau meminimalkan terjadinya kesalahan yang biasa terjadi karena SK atau pangkat golongan serta agar lebih efisien adalah sebagai berikut.

1. Pertama, dimulai dari BPJS/JKN melakukan *transfer* ke rekening BLUD UPT Puskesmas Pahandut dan divisi keuangan mencetak rekening koran per tanggal 15 setiap bulannya. Kemudian membuat NCR (slip gaji) secara terkomputerisasi dan mengirim ke KABAG TU dalam bentuk *file*. Selanjutnya *file* tersebut diperiksa kesesuaiannya oleh KABAG TU dan melanjutkan mengirimkannya kepada Pimpinan. Pimpinan menyetujui secara tersistem.

2. Kedua, divisi keuangan membuat dan mengirimkan *file* surat pertanggungjawaban (SPJ) insentif jasa pelayanan kepada pimpinan. Pimpinan menyetujui. Kemudian, KABAG TU mencetak dokumen dan menyerahkan SPJ insentif jasa pelayanan ke penerima insentif serta membuat pengumuman secara resmi agar penerima insentif memeriksa kembali dengan teliti nominal yang seharusnya diterima dengan pangkat atau golongan masing-masing yang telah dilaporkan ke bagian TU.
3. Ketiga, melakukan pencairan insentif jasa pelayanan berdasarkan berkas fisik dari KABAG TU yang sudah ditandatangani oleh seluruh penerima insentif. Membuat Laporan Realisasi dan Buku Kas Umum (BKU). Selanjutnya yang terakhir, divisi keuangan menyerahkan dua buah laporan tersebut kepada pihak Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.

KESIMPULAN

Sistem pencatatan yang telah dilaksanakan oleh BLUD UPT Puskesmas selama ini cukup sederhana,

tetapi belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan oleh kendala pada SK atau pangkat/golongan yang terkadang tidak dilakukan pembaruan akibatnya terjadi kesalahan penghitungan nominal insentif jasa pelayanan yang diterima setiap tenaga kerja.

Pembentukan dana kas BLUD untuk insentif jasa pelayanan sudah terlaksana dengan cukup baik. Pengelolaan keuangan pada pengeluaran kas untuk insentif jasa pelayanan di BLUD UPT Puskesmas Pahandut dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran BLUD. Sumber pendapatan BLUD untuk insentif jasa pelayanan ini berasal dari JKN yang kini termasuk ke dalam BLUD.

Alih status UPTD ke BLUD menyebabkan adanya adaptasi bagi pihak BLUD UPT Puskesmas Pahandut hingga bisa diterapkan dengan baik.

Penerimaan insentif oleh tenaga kerja (ASN dan tenaga kontrak) peralihan status ini mengalami penurunan sebab persentase pembagiannya sudah berkurang, dari yang awalnya 70% menjadi 60% saja karena mengikuti aturan PERWALI sejak sumbernya berasal dari BLUD.

DAFTAR RUJUKAN

Adi Kurniawan, Taufan. 2020. *Sistem Informasi Akuntansi dengan Pendekatan Simulasi*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.

Apresiasi Penerapan BLUD di Puskesmas Pahandut,
mediacenter.palangkaraya.go.id, 9 Januari 2020. Diakses pada 12 April 2021.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta.

Ekasari, Ratna, M. Sungging Pradana, dkk. *Analisis Kualitas Pelayanan Puskesmas dengan Metode Serwoqual*. Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam. Vol. IX. No. 1: 86-93.

Himawan Hilmi Satria. 2018. *Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Persediaan (Studi pada Hamzah Batik)*. Tesis Magister. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

<https://www.harmony.co.id/blog/apa-itu-pengeluaran-kas-dalam-akuntansi-simak-selengkapny>. Diakses 30 september 2021 pukul 09.39 WIB.

Krismiaji. 2015 *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, cet. Ke-4.

Krismiaji. 2015. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu YKPN.

Mengubah Status Puskesmas Menjadi BLUD. JAMSOS INDONESIA. Dalam jamsosindonesia.com. Diakses pada 12 April 2021.

Nurhasanah, Siti, dkk. 2019. *Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Obat Dalam Pencegahan Kecurangan Pada Puskesmas.* Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia. Vol. 2. No. 2.

PengusahaMuslim.Com. *Hukum Mengambil Dan Menguasai Hak Orang Lain Secara Zalim (bag. 1).* <https://pengusahamuslim.com/32-32-hukum-mengambil-dan-1720.html>. Diakses pada 14 April 2022.

Standar Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan Nomor 13, Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. 2015. Jakarta: KSAP (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan), salinan.

SK Penetapan BLUD Pahandut, Keputusan Walikota Palangka Raya, Nomor 188.45/404/2019.

Wiratna Sujarweni, V. 2015. *Sistem Akuntansi.* Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

LAMPIRAN

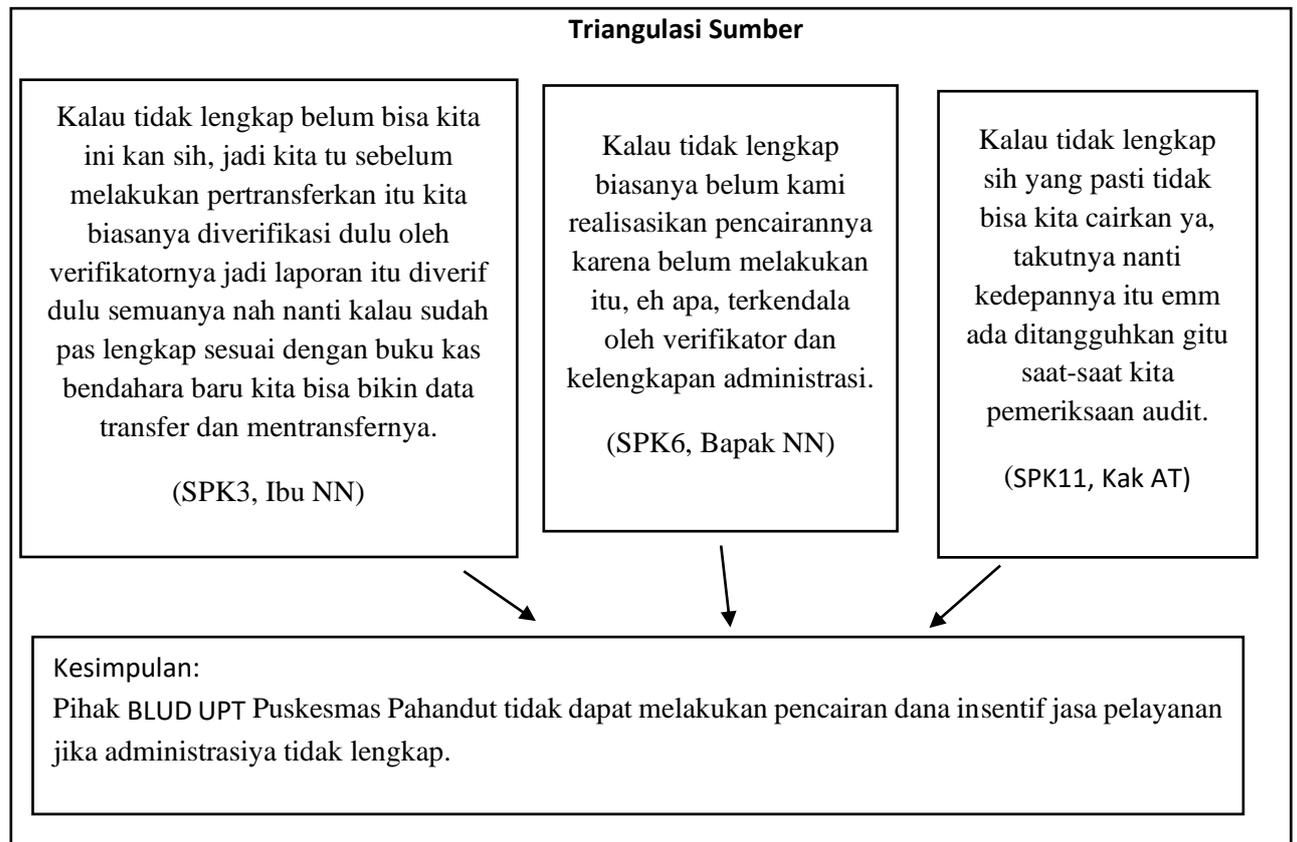
Lampiran 1 Hasil Analisis Tema

| ID | Ref | Subtema | Tema |
|-----------|------------|---|------------------------|
| NN | SPK2 | Pencatatan pengeluaran kas yang menyangkut pembayaran insentif jasa pelayanan | Siklus pengeluaran kas |
| | SPK3 | Pencatatan pengeluaran kas yang menyangkut pembayaran insentif jasa pelayanan | |
| | SPK4 | Pencatatan pengeluaran kas yang menyangkut pembayaran insentif jasa pelayanan | |
| | SPK5 | Pencatatan pengeluaran kas yang menyangkut pembayaran insentif jasa pelayanan | |
| | SBK1 | Pembuatan bukti pengeluaran kas untuk jasa pelayanan | |
| SY | SPK6 | Pencatatan pengeluaran kas yang menyangkut pembayaran insentif jasa pelayanan | |
| | SPK7 | Pencatatan pengeluaran kas yang menyangkut pembayaran insentif jasa pelayanan | |
| | SPK8 | Pencatatan pengeluaran kas yang menyangkut pembayaran insentif jasa pelayanan | |
| AT | SPK11 | Pencatatan pengeluaran kas yang menyangkut pembayaran insentif jasa pelayanan | |
| | SPK12 | Pencatatan pengeluaran kas yang menyangkut pembayaran insentif jasa pelayanan | |
| | SPK13 | Pencatatan pengeluaran kas yang menyangkut pembayaran insentif jasa pelayanan | |
| | SBK2 | Pembuatan bukti pengeluaran kas untuk jasa pelayanan | |
| | SPT2 | Sumber pendapatan BLUD untuk insentif jasa pelayanan | |
| | DSTAT1 | Alih Status UPTD ke BLUD | |

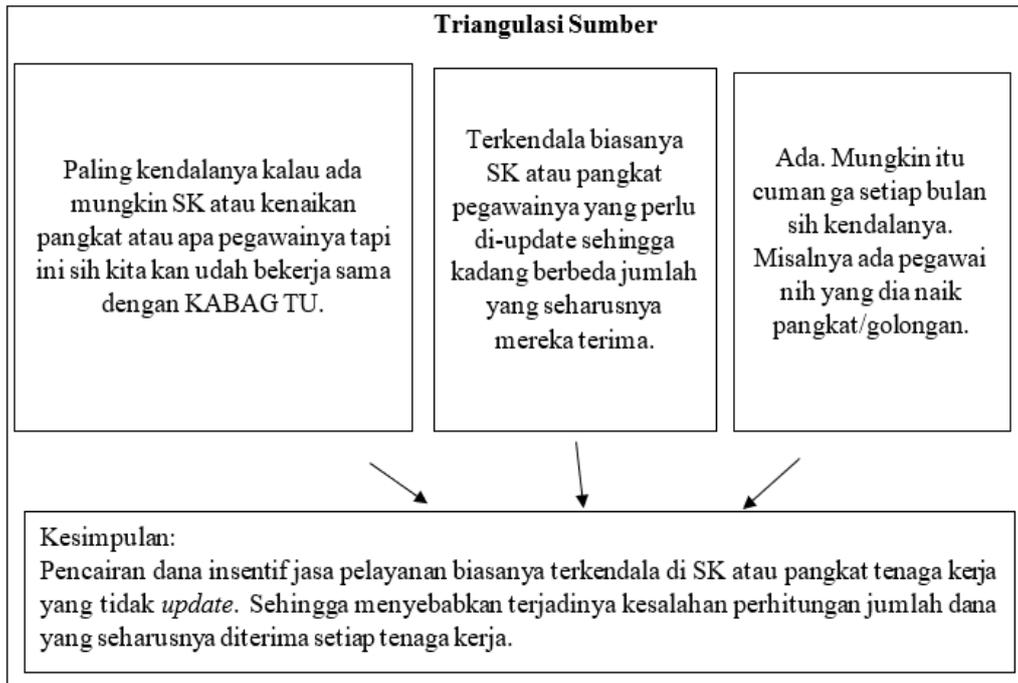
| | | | |
|----|--------|---|--|
| NN | DPKeu2 | Pengelolaan keuangan pada pengeluaran kas untuk insentif jasa pelayanan | Dampak perubahan alih status UPTD menjadi BLUD |
| | DPP1 | Penerimaan insentif oleh pegawai (ASN dan tenaga kontrak) | |
| | DSTAT2 | Alih Status UPTD ke BLUD | |
| | DSB3 | Sumber pendapatan BLUD untuk insentif jasa pelayanan | |
| SY | DSTAT4 | Alih Status UPTD ke BLUD | |
| | DPP2 | Penerimaan insentif oleh pegawai (ASN dan tenaga kontrak) | |
| | DSTAT5 | Alih Status UPTD ke BLUD | |
| | DPKeu3 | Pengelolaan keuangan pada pengeluaran kas untuk insentif jasa pelayanan | |
| | DSB7 | Sumber pendapatan BLUD untuk insentif jasa pelayanan | |
| AT | DPP4 | Penerimaan insentif oleh pegawai (ASN dan tenaga kontrak) | |
| | DPKeu4 | Pengelolaan keuangan pada pengeluaran kas untuk insentif jasa pelayanan | |
| | DSTAT6 | Alih Status UPTD ke BLUD | |
| | DSTAT7 | Alih Status UPTD ke BLUD | |
| | DSB8 | Sumber pendapatan BLUD untuk insentif jasa pelayanan | |
| | SPT2 | Sumber pendapatan BLUD untuk insentif jasa pelayanan | |
| | DPP3 | Penerimaan insentif oleh pegawai (ASN dan tenaga kontrak) | |
| AL | DSTAT9 | Alih Status UPTD ke BLUD | |
| | DPP5 | Penerimaan insentif oleh pegawai (ASN dan tenaga kontrak) | |
| | DSB9 | Sumber pendapatan BLUD untuk insentif jasa pelayanan | |

Sumber: dibuat oleh peneliti tahun 2022

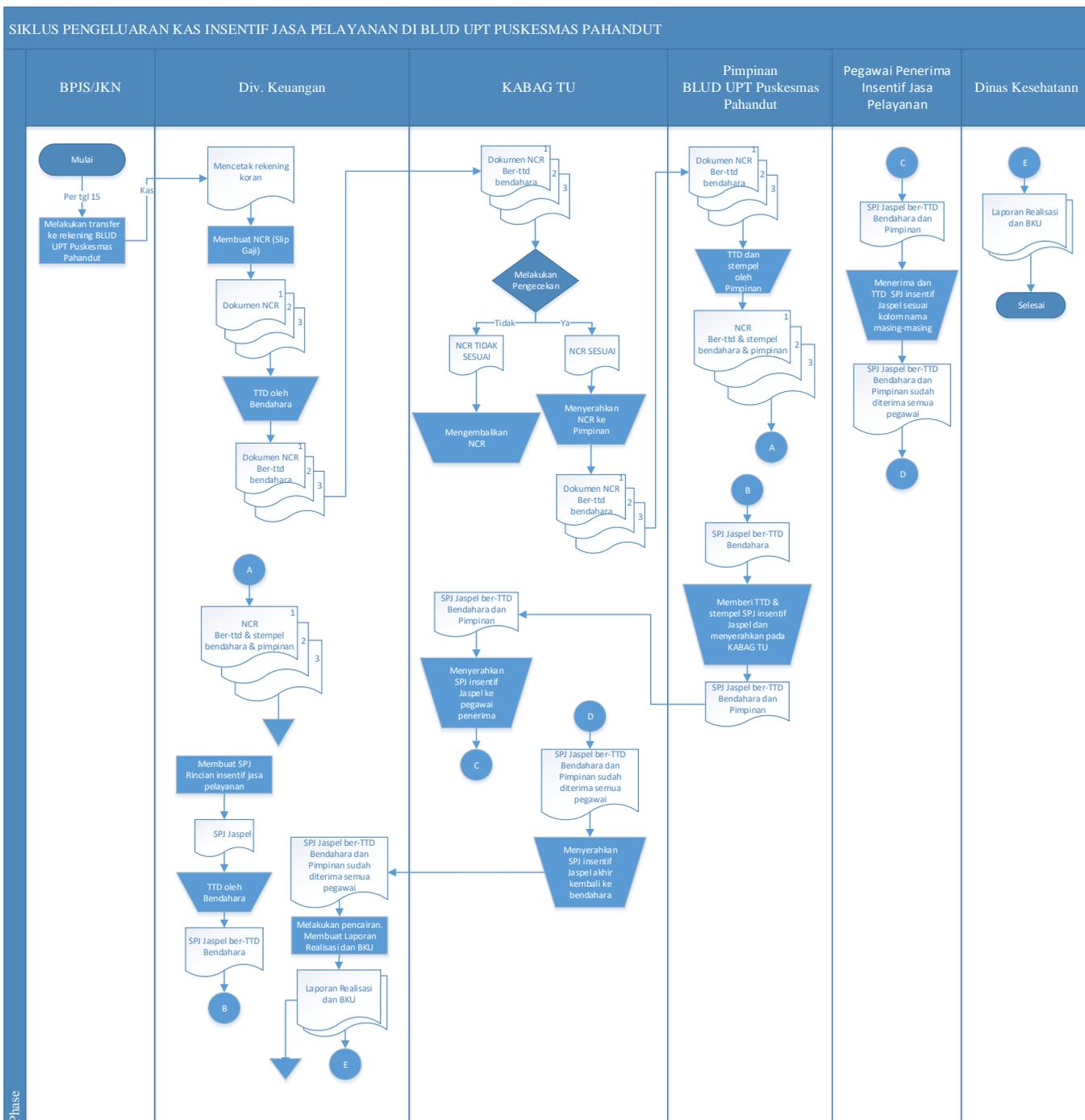
**Lampiran 2 Triangulasi Sumber Pengelolaan Keuangan pada Pengeluaran Kas
untuk Insentif Jasa Pelayanan**



Lampiran 3 Triangulasi Sumber Pengelolaan Keuangan pada Pengeluaran Kas untuk Insentif Jasa Pelayanan



Lampiran 4 Flowchart Pengeluaran Kas Insentif Jasa Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Pahandut



Lampiran 5 Saran Flowchart Pengeluaran Kas Insentif Jasa Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Pahandut

